

**ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)  
(Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan)**

**SKRIPSI**

**RAHMAH HARDANTI PUTRI**

**NIM : 15622267**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)  
(Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**RAHMAH HARDANTI PUTRI**

**NIM : 15622267**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

**TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)  
(Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan)**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

**RAHMAH HARDANTI PUTRI**

NIM. 15622267

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**Ranti Utami, S.E.,M.Si.,Ak.CA**

NIDN. 1004117701 / Lektor

**Hasnarika, S.Si, M.Pd**

NIDN. 1020118901 /Asisten Ahli

Mengetahui

Ketua Program Studi,

**Hendy Satria, S.E,M.Ak**

NIDN. 1015069101 / Lektor

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)  
(Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan)**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Rahmah Hardanti Putri

NIM : 15622267

Telah di Pertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Lima Belas  
Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

**Ranti Utami, S.E.,M.Si.Ak.CA**

NIDN. 1004117701 / Lektor

**Charly Marlinda,SE.,M.Ak.Ak, CA**

NIDN. 1029127801 / Lektor

Anggota

**Bambang Sambodo, S.E.,M.Ak.**

NIDK. 8833900016 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 15 Januari 2019  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang  
Ketua

**Charly Marlinda, SE, M.Ak. Ak. CA**

NIDN. 1029127801 / Lektor

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAH HARDANTI PUTRI  
NIM : 15622267  
Tahun Angkatan : 2015  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.45  
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1  
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM  
PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)  
(Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Januari 2020

Penyusun

**RAHMAH HARDANTI PUTRI**  
**NIM: 15622267**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



### *Alhamdulillah wassyukurillah wanikmatullah warahmatullah*

*Sujud syukurku kusembahkan kepada-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yng begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayatmu telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta semangat pantang menyerah dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang ada disetiap ummatmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan Salam selalu ku limpahkan atas keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.*

*Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah.*

***Teristimewa Nenek, Ayahanda dan Ibunda tercinta, terkasih, tersayang serta yang terhormat.** Terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung ku dalam setiap langkahku, orangtua yang selalu tersenyum walau tubuh penuh memar dan berdarah. Terima kasih nenek, ayah dan ibu yang selalu menjadi tumpuan ku selama ini, yang selalu ada dalam situasi apapun, yang selalu sabar menghadapi tingkah laku serta sikapku selama ini. Mungkin ini hanya hadiah kecil yang dapat kuberikan saat ini, dan juga sebagai kenangan bahwasanya kalian pernah berjuang untuk aku sampai dititik ini.*

***Tersayannng dan yang sangat ku hormati keluargaku, tante Neny Iswanti, oom Budhi Lesmana dan Hendri Wahyudi. Adik-adik ku M.Iqbal Rizki, M. Shafwan Rafif, Kheysa Humaira Putri, M.Zain Ansyah dan M.Raffa Azzikra.** Terimakasih atas motivasi yang telah kalian berikan, atas doa yang kalian panjatkan aku dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa bangga. Terimakasih ku ucapkan sekali lagi untuk keluarga besar dan adik-adikku yang ku miliki atas doa dan dukungannya.*

***Teruntuk yang kusayangi dan yang kuhormati kedua dosen pembimbingku.** Izinkan aku mengantarkan ucapan terima kasih untukmu dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkanku mengantungi gelar sarjana, Terima kasih Bu Ranti dan Bu Hasnarika. Bu saya bersyukur menjadi salah satu anak bimbinganmu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua kritikan dan*

*tuntutan yang telah kalian berikan. Sebagai mahasiswa yang penuh keterbatasan tentu engkau berulang kali menahan kemarahan dalam menuntunku, seluruh bekal yang kalian berikan kepadaku takkan pernah ku lupakan dan ku jadikan sebagai modal untuk menjawab tantangan dimasa yang akan datang. Untuk semua kemarahan, kritikan, dan tuntutan yang diberikan, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Semoga kebaikan kalian juga selalu menyertaimu.*

***Teruntuk yang kuhormati, Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf STIE Pembangunan Tanjungpinang.*** Izinkan kuucapkan terima kasih karena telah memberikan pengajaran yang sangat berarti serta pelayanan yang sangat baik yang saya terima penulis selama ini.

***Tak lupa, sahabat, teman seperjuangan yang saya sayangi.*** Ketahuilah sahabat (***Astri Rahma.P, Wan Ulfa Agustina, Annisa Aulia, Febrand Indrajid Valentine, Ranila Komalasari, Tri Haryati, Lina Ayu Wandira, Dessy Wulandari, Dwinita Rahmayanti, dan Jane Indri Prastika***) saya sangat berterima kasih karena memiliki sahabat seperti kalian yang menolong serta membantu saya dalam keadaan apapun, serta mendukung saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Percayalah sahabat walaupun kelak kita tidak tegur menyapa, jarak yang memisahkan, kesibukan masing-masing yang akan segera terlaksanakan. Kalian tetap sahabat ku, dan aku tidak akan melupakan kebaikan kalian terhadapku selama ini, jika aku mempunyai banyak kesalahan jangan jadikan itu alasan untuk memutuskan silaturahmi kita.

***Dan juga orang yang spesial yang selalu mendukung setiap langkah saya, Yodi Herlannga,*** yang selalu menemani dalam susah maupun senang, yang tak pernah berhenti menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.

Serta teman seperjuangan yang saya kasihi ( ***Akuntansi Malam 3 2015*** ) Kalian tetap yang istimewa sepanjang perjalanan perkuliahan yang kita tempuh bersama. Sukses buat kita bersama masuk bersama dan harus keluar bersama.

*Skripsi ini ku persembahkan untuk  
STIE Pembangunan Tanjungpinang*

## MOTTO

لِنَفْسِهِ يُجَاهِدُ فَإِنَّمَا جَاهِدَ وَمَنْ

Artinya, "*Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri*"

***Better to feel how hard education is at this time rather than fell the bitterness of stupidity, later.***

"Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang daripada rasa pahitnya Kebodohan kelak"

Jangan pernah menunda  
Suatu pekerjaan, karena kamu tidak bisa menunda  
waktu yang berjalan terus.



## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) (Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan)” ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,
2. Ibu Ranti Utami, S.E.,M.Si.Ak.CA, selaku wakil ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang serta sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan nasehatnya yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan,

3. Ibu Sri Kurnia, S.E.,Ak.M.Si.CA, selaku Wakil ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
4. Bapak Imran Ilyas, MM selaku Plt. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E,M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Masyitah As Sahara S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
7. Ibu Hasnarika, S.Si.,M., Pd Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan menyemangati dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Lestari Rahayu, S.Pd Kepala Sekolah SLB Negeri Bintan dan Ibu Dewi Retno Lestari, S.Pd Bendahara SLB Negeri Bintan yang sudah membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, Januari 2020

Penulis

**RAHMAH HARDANTI PUTRI**  
**NIM. 15622267**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<i>ABSTRACT</i> .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Batasan Masalah.....	13
1.5. Kegunaan Penelitian.....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
2.1. Tinjauan Teori .....	16
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan .....	16
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan .....	16
2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan .....	17
2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan ... ..	19
2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah .....	20

2.1.2.1	Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah.....	20
2.1.2.2	Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah .....	22
2.1.2.3	Jenis-Jenis Laporan Keuangan.....	23
2.1.3	Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) .....	25
2.1.3.1	Pengertian APBN.....	25
2.1.3.2	Pelaksanaan APBN .....	26
2.1.3.3	Pertanggungjawaban APBN .....	27
2.1.4	Pengelolaan Dana .....	27
2.1.4.1	Pengertian Pengelolaan Dana.....	27
2.1.5	Laporan Pertanggungjawaban .....	29
2.1.5.1	Pengertian Laporan Pertanggungjawaban.....	29
2.1.6	Efektivitas .....	31
2.1.6.1	Pengertian Efektivitas .....	31
2.1.7	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) .....	32
2.1.7.1	Tujuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ...	33
2.1.7.2	Pemberi Bantuan Pemerintah.....	34
2.1.7.3	Persyaratan Calon Penerima Bantuan .....	34
2.1.7.4	Bentuk Bantuan Pemerintah.....	34
2.1.7.5	Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah .....	34
2.1.7.6	Organisasi Pelaksana,Tugas dan Tanggungjawab .	35
2.2.	Kerangka Pemikiran .....	39
2.3.	Penelitian Terdahulu .....	39
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>45</b>
3.1.	Jenis Penelitian.....	45
3.2.	Jenis Data .....	46
3.3.	Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.4.	Teknik Pengelolaan Data .....	48
3.5.	Teknik Analisis Data .....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
4.1. Hasil Penelitian .....	50
4.1.1 Gambaran Umum Sekolah SLB Negeri Bintan .....	50
4.2. Kesesuaian BOP JUKLAK Tahun 2018 .....	54
4.2.1 Organisasi Pelaksana .....	54
4.2.2 Mekanisme Pengelolaan BOP PKLK Tahun 2018 .....	56
4.2.3 Rencana Kegiatan .....	58
4.2.4 Pembelanjaan Dana .....	59
4.2.5 Pertanggungjawaban Dana .....	60
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
 BAB V PENUTUP.....	 68
5.1. Kesimpulan .....	68
5.2. Saran .....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rencana Kegiatan BOP PKLK Tahun 2018 .....	11
Tabel 3.1 Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas) .....	49
Tabel 4.1 Rencana Kegiatan BOP PKLK Tahun 2018 .....	57
Tabel 4.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOP PKLK Tahun 2018 .....	58
Tabel 4.3 Rekap Hasil Dokumentasi BOP PKLK Tahun 2018 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi SLB Negeri Bintan .....	53

## **A B S T R A K**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) (Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan)**

Rahmah Hardanti Putri, 15622267. Akuntansi.STIE Pembangunan Tanjungpinang  
[rahmahhardanti putri@gmail.com](mailto:rahmahhardanti putri@gmail.com)

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Dana

Perumusan masalah dalam perumusan ini adalah Apakah pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah BOP PKLK Tahun 2018 dan Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PKLK Tahun 2019 di SLB Negeri Bintan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengelolaan dana BOP PKLK dengan kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah BOP PKLK Tahun 2018 dan Efektivitas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PKLK Tahun 2018 pada SLB Negeri Bintan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis seluruh data yang digunakan untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan dana BOP SLB Negeri Bintan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, survey atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOP di SLB Negeri Bintan belum berjalan secara efektif dengan rata-rata presentase efektivitas sebesar 72% hal ini dikarenakan ada beberapa komponen yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PKLK tahun 2018 sehingga penyampaian laporan mengalami kendala.

Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Referensi : 50 (25 Buku + 10 Skripsi + 10 jurnal nasional + 5 jurnal internasional)

Dosen Pembimbing I : Ranti Utami, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Pembimbing II : Hasnarika, S.Si.,M., Pd



## **A B S T R A C T**

### **AN ANALYSIS OF EFFECTIVENESS IN MANAGEMENT OF EDUCATIONAL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOP) (CASE STUDY OF SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BINTAN)**

Rahmah Hardanti Putri, 15622267. Akuntansi.STIE Pembangunan Tanjungpinang  
[rahmahhardantiputri@gmail.com](mailto:rahmahhardantiputri@gmail.com)

*In this research, the formulation of the problem is whether the management of Educational Operational Assistance (BOP) is according to the 2018 BOP PKLK Government Implementation Guidelines.*

*The purpose of this research was to find out and analyze the procedures for managing the Education Operational Assistance (BOP) of PKLK funds on 2018 and its suitability with BOP PKLK Government Implementation Guidelines and the Effectiveness of Education Operational Assistance (BOP) of PKLK in 2018 at the SLB Negeri Bintan.*

*The research design was a qualitative descriptive, which is conducted by analyzing all data used to determine the effectiveness of BOP SLB Negeri Bintan fund management. This research used two types of data, which are primary and secondary data. The Technique of Data Collecting in this research was the study of literature, surveys or observations, interviews and documentation. The Data Analysis was a qualitative analysis.*

*The results showed that the management of BOP funds in Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan was not run effectively, with an average percentage effectiveness of 72%. The reason because there are several components that are not in accordance with the Implementation Guidelines for the Implementation of Education Operational Assistance (BOP) in 2018, so that the submission of reports has experienced obstacles.*

*Thesis of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang*

*Reference : 50 (25 Books + 10 Thesis + 10 national journals + 5 international journals)*

*Advisor I : Ranti Utami, S.E., M.Sc.Ak.CA*

*Advisor II : Hasnarika, S.Si.,M., Pd*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia Pendidikan dipandang menjadi suatu sarana untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Suatu bangsa bias dikatakan maju apabila warga negaranya peduli terhadap pendidikan dan bisa dilihat dan tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga Negara itu sendiri. Pencapaian dan keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari keseimbangan antara tujuan pemerintah dan keterlaksanaan pendidikan. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat. Salah satu tujuan Negara Indonesia di antaranya juga mencerdaskan bangsa melalui pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Program Direktorat Pembinaan PK-LK Dikdasmen untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta perintisan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah memberikan Bantuan

Operasional Pendidikan yang bertujuan untuk memperbesar peluang bagi peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan.

Pendidikan di Indonesia ada berbagai macam dan berbagai jenjang, baik secara terstruktur yaitu Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal. Sedangkan berjenjang dibagi menjadi empat kelompok yaitu Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan di Indonesia menjadi kewajiban dan diatur oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang serta mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan menjadi sektor yang sangat menunjukkan kualitas bangsa. Suatu kegagalan pendidikan sangat berpengaruh pada gagalnya suatu bangsa, begitu juga dengan keberhasilan secara implusif membawa keberhasilan. Di dunia Pendidikan, harusnya pemerintah memperhatikan unsur pendidikan antara lain yaitu Peserta didik, pendidik (Guru), sarana dan prasarana. Aset yang dibutuhkan dalam pendidikan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat diperoleh dari siswa, masyarakat dan dari pendidik (Guru).

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Permasalahan utama yang ada didalam pembiayaan pendidikan yakni salah satunya adalah bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana cara untuk melindungi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu memperjuangkan haknya untuk mengenyam pendidikan secara layak, baik di tingkat Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Dalam hal tersebut, pemerintah memiliki upaya untuk mengatasinya, dengan cara memberikan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. BOP memiliki sasaran yakni seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merupakan program pemerintah yang digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia. Dikarenakan sifatnya bantuan, pihak sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) melibatkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan operasional lainnya.

Bantuan Operasional Pendidikan bertujuan untuk mengatasi biaya operasional pendidikan, meringankan beban orang tua terhadap pembiayaan pendidikan, memberikan motivasi bagi penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dan mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau

dan bermutu. Keberhasilan pelaksanaan BOP dapat dilihat dari percepatan penuntasan wajib belajar, Efektivitas pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) juga dapat dilihat dari peningkatan pencapaian pendidikan siswa.

Sebagai makhluk Tuhan yang dianggap memiliki derajat tertinggi diantara makhluk lainnya, Manusia memiliki kebutuhan yang paling kompleks, antara lain seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Akan tetapi, Tuhan menciptakan manusia dengan kondisi yang berbeda satu sama lain, ada yang terlahir normal dan ada pula yang terlahir dengan kondisi yang 'berbeda' yakni, yang lebih dikenal dengan sebutan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ataupun anak disabilitas.

Umumnya, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan fisik bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut, yaitu faktor internal yang didapatkan dari mereka lahir dan ada juga faktor eksternal yang mereka dapatkan akibat terjadinya kecelakaan, sakit seperti demam yang sangat tinggi, dan faktor yang lainnya. Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sangat bermacam-macam, antara lain:

1. Tunanetra
2. Tunarungu
3. Gangguan komunikasi
4. Tunagrahita
5. Tunadaksa
6. Tunalaras, dan
7. Tunaganda.

Dari data Laporan Bulanan yang masuk pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau khususnya Bidang PENDIDIKAN KHUSUS, terdapat 14 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Kepulauan Riau yang terdaftar yaitu:

1. 3 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Tanjungpinang.  
2 Sekolah Negeri dan 1 Sekolah Swasta,
2. 3 Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) di Kabupaten Bintan,  
1 Sekolah Negeri dan 2 Sekolah Swasta.
3. 4 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kota Batam.  
1 Sekolah Negeri dan 3 Sekolah Swasta dan
4. 4 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Karimun.  
2 Sekolah Negeri dan 2 Sekolah Swasta.

Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ditujukan tepat sasaran dalam mendukung operasional penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) agar digunakan secara efektif dan efisien. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung. Pertanggungjawaban keuangan dana BOP SLB di Provinsi Kepulauan Riau di percayakan dapat di laksanakan dengan tertib administrasi, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

Pada beberapa daerah tertentu, masih terdapat masyarakat yang memiliki kurangnya kesadaran dalam mengenyam pendidikan, terutama bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Mereka menganggap bahwa anak-anak tersebut tidak memerlukan pendidikan padahal pendidikan itu sangat penting dan tidak

memandang kalangan tertentu. Adapun mereka yang menyadari pentingnya pendidikan namun terkendala oleh masalah biaya. Dikarenakan kurangnya informasi pengetahuan tentang adanya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tersebut sehingga mereka tidak memberikan pendidikan terhadap anak tersebut. Untuk itulah peran guru dan para pendidik lainnya melakukan sosialisasi agar anak-anak tersebut bisa bersekolah.

Sebagian masyarakat awam belum mengerti betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Terkhususnya lagi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kebanyakan orangtua tidak tahu bagaimana cara menangani mereka dengan tepat. Maka, disinilah peran Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi hal yang penting bagi mereka. Terlebih lagi biaya hidup untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terbilang cukup besar. Seperti anak Autis yang harus melakukan proses terapi agar kondisi mereka bisa membaik. Bagi masyarakat menengah ke atas, biaya bukan merupakan masalah. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah, hal tersebut merupakan kendala bagi mereka.

Salah satu pemanfaatan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB) yaitu asesmen, yang mana merupakan bagian dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Asesmen adalah proses dimana Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melakukan identifikasi dini yang sering dimaknai dengan proses penjarangan suatu upaya seseorang (guru, orang tua, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan / penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional atau tingkah laku). Dari proses asesmen tersebut, barulah orang tua dan

guru mendapatkan hasil identifikasi tentang kelainan ataupun penyimpangan anak. Program asesmen penting untuk memantau tumbuh perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut. Biasanya, program tersebut dilaksanakan setiap tahun, dimana para ahli memantau apakah anak-anak tersebut berkembang dengan baik atau justru sebaliknya.

Untuk mengetahui hasil yang valid dari asesmen tentu juga memerlukan biaya tidak sedikit apalagi asesmen dilaksanakan pertahun dan harus dilakukan oleh ahli yang bersangkutan, yang terjadi masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki biaya untuk melakukan asesmen. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) juga sulit untuk berinteraksi terhadap lingkungan, karena mereka memiliki tingkat sensitif yang cukup tinggi, bagi anak yang tidak memiliki keterbatasan mudah saja untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya, namun tidak gampang bagi penyandang disabilitas mereka memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi. Banyak juga yang menutup diri, namun ada beberapa yang tidak, mereka hanya bersosialisasi seperti orangtua, keluarga, guru dan teman-teman disabilitasnya.

Di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dikatakan sulit, sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi masalah di Tanah air. Minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya kemampuan pribadi juga jadi penyebab kesulitan mencari pekerjaan. Bagi yang tidak mempunyai keterbatasan fisik mungkin masih dikatakan mudah, namun bagi penyandang disabilitas itu adalah kendala, Misalnya saja anak yang tunarungu sulit untuk berkomunikasi, padahal modal utama dalam bekerja salah satunya adalah komunikasi yang baik. Karena dengan



komunikasi yang apik, penyampaian ide maupun gagasan dapat tersalurkan dengan tepat.

Untuk lulusan sarjana saja masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi yang hanya lulusan SMA. Selain itu keterampilan sangat dibutuhkan juga. Di bidang pendidikan terbagi dua yaitu pendidikan akademik dan non akademik. Anak penyandang disabilitas sangat sulit untuk menerima pendidikan akademik. Mereka butuh bekal keterampilan, yang perlu diberikan kepada mereka adalah pelatihan keterampilan untuk mengasah keahlian-keahlian mereka dibidang keterampilan, agar mereka mampu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mempunyai modal keterampilan sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, merencanakan dan mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Bantuan tersebut diberikan penyelenggara pendidikan khusus satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB/SKh.

Pada dasarnya Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) merupakan bagian dari skenario pendanaan pendidikan seperti biaya investasi, operasional dan biaya lainnya untuk peserta didik. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ini adalah bantuan pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu pihak sekolah, baik negeri maupun swasta, dalam memenuhi biaya operasional sekolah

khususnya non-personalia serta menjamin keberpihakan masyarakat bagi siswa yang tidak mampu.

Untuk terlaksananya pencapaian tujuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pembinaan PK-LK telah menerbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Pedoman ini untuk mengatur tata cara, waktu pencairan dana, pemanfaatan dana, keterlibatan pihak yang bersangkutan sampai dengan pelaporan dana BOP tersebut.

Pelaksanaan BOP akan menjadi efektif apabila pihak yang menerima dana BOP melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis seperti ketepatan waktu penerimaan oleh pihak sekolah sehingga dapat dimanfaatkan. Selain itu, keberpihakan pemerintah bagi siswa yang kurang mampu akan menjadi efektif dan efisien apabila pihak sekolah melaksanakan program tersebut. Pengelolaan dana dan semua sumberdaya yang ada dalam program BOP PKLK merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh atas keberhasilan program BOP PKLK. Pengelolaan dana BOP PKLK yang baik akan membantu ketercapaian tujuan dari program tersebut.

SLB Negeri Bintang merupakan salah satu sekolah penerima dana BOP PKLK, yang mempunyai jumlah murid 53 orang dan 1 pengurus dana BOP yaitu bendahara sekolah, serta mempunyai tenaga pengajar 14 orang yang terdiri dari : 3 orang guru PNS, 7 orang GTT Provisinsi, 2 orang tata usaha PTT Provisinsi, dan 2 orang Honor Sekolah.

Dalam pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) pada SLB Negeri Bintang terjadi kelambatan dalam hal penyajian pelaporan pertanggung jawaban pada pelaporan tahun 2018. Hal ini dikarenakan terjadinya keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan kosongnya kas pada awal tahun sementara ada kegiatan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan oleh sekolah yang membutuhkan biaya. Keterlambatan ini juga terkait saat penyajian laporannya, pada JUKLAK BOP PKLK seharusnya laporan pelaksanaan dilaporkan paling lambat Desember 2018 atau akhir tahun, tapi yang terdapat di SLB Negeri Bintang tidak sesuai dengan JUKLAK tersebut dan terjadi kelebihan dana ataupun dana yang belum terpakai pada saat batas waktu pelaporan pada tahun 2018.

Pengelolaan dana BOP di SLB Negeri Bintang dikelola oleh bendahara saja, tidak ada pihak yang di ikut sertakan dalam pengelolaan ini, dan tidak adanya kurangnya peran Komite Sekolah yang bertugas membantu melakukan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan dana Bantuan Pemerintah PKLK untuk BOP PKLK Tahun 2018. Komite sekolah seharusnya juga dapat berpartisipasi untuk mengawasi pengelolaan dana BOP melalui kotak saran pengaduan masyarakat maupun pengaduan ke pihak sekolah. Pada umumnya dalam pelaksanaan BOP, sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang telah dibelanjakan oleh sekolah di papan pengumuman dan ditandatangani ataupun disetujui oleh komite sekolah. Selain itu juga sekolah seharusnya menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOP PKLK kepada pihak orang tua. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan

tentang pelaksanaan BOP, kurangnya sosialisasi terhadap orang tua murid maupun masyarakat yang terlibat.

**Tabel 1.1**  
**Rencana Kegiatan Bantuan Operasional**  
**Pendidikan (BOP) PKLK Tahun 2018**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2018
1	Penerimaan Usulan	Februari 2018
2	Rekapitulasi dan validasi usulan	Februari 2018
3	Penetapan penerimaan bantuan	Maret 2018
4	Penandatanganan perjanjian kerjasama	Maret s.d Juni 2018
5	Penyaluran dana	April - Desember 2018
6	Laporan pelaksanaan dari sekolah	Paling lambat Desember 2018

*Sumber : Petunjuk Teknis BOP PKLK Tahun 2018.*

Adapun penelitian yang didapat bahwa untuk kelancaran pemanfaatan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SLB tersebut dibutuhkan biaya operasional. Dan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pemakaian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tersebut. Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) juga sangat kurang. Mengingat dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) berasal dari anggaran pemerintah dan salah satu kebijakan keuangan pemerintah di dalam bidang pendidikan untuk

masyarakat, masyarakat sangat berhak untuk mendapatkan transparannya dari penggunaan dana tersebut.

Melihat pentingnya Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PKLK dalam pelaksanaan pendidikan dan berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Efektivitas dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) (Studi Kasus Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk BOP PKLK?
2. Bagaimana Efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan dan kesesuaian dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk BOP PKLK.

2. Untuk menganalisis Efektivitas dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Sekolah yang diteliti yaitu Sekolah Luar Biasa Negeri Bintan, Laporan Keuangan diambil pada tahun 2018.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan diharapkan pula dapat berguna sebagai bahan pendidikan untuk menambah wawasan serta menerapkan pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang baik agar mendapatkan hasil yang efektif pada Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu referensi yang bermanfaat dan mengetahui secara mendalam efektivitas dalam pengelolaan dana keuangan Bantuan Operasional Pendidikan di SLB Negeri Bintan.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi Pemerintahan / OPD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai gambaran kondisi yang bersangkutan dan bagi peneliti untuk kepentingan penelitian dan perbaikan pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun berikutnya serta peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan dana BOP PKLK.

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

#### 3. Bagi pihak sekolah yang menerima Dana BOP PKLK

Diharapkan agar bisa memberikan tambahan pengetahuan dan lebih transparan dalam Pengelolaan Dana BOP PKLK

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara ilmiah maupun praktis serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab kedua terdiri dari tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan penelitian terdahulu yang berguna sebagai acuan penelitian.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga terdiri dari metode penelitian yang digunakan, definisi operasional variable, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat terdiri dari gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan penjelasan pendukung dalam penyusunan kesimpulan penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab kelima terdiri dari kesimpulan mengenai hasil penelitian yang diberikan oleh peneliti atas penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi objek penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Pemerintahan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan merupakan pencatatan, pengukuran dan transaksi keuangan yang mengelola dana masyarakat, yang termasuk kategori sektor publik yang mengelola dana masyarakat adalah pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aktivitas akuntansi yang dilakukan untuk kejadian dan transaksi keuangan sektor publik. (Siregar, 2015)

Akuntansi pemerintahan adalah ilmu akuntansi yang sedang berkembang saat ini, yang merupakan sebuah pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintahan untuk melaporkan dana-dana yang dikelola pemerintah agar lebih transparan dan akuntabilitas terhadap masyarakat. (Nordiawan, 2010)

Akuntansi pemerintahan adalah sektor yang mengelola dana masyarakat. Aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Akuntansi yang diterapkan dilingkungan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (Siregar, 2015)

Akuntansi pemerintahan adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah dari kabupaten, kota maupun provinsi yang dijadikan untuk informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang

memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah. (Halim, 2012)

Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. (Halim, 2012)

Jadi, dapat disimpulkan Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan dan tunduk pada standar akuntansi keuangan pemerintah (SAP).

#### **2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Berbagai ragam karakteristik organisasi pemerintahan yang telah dijelaskan sebelumnya, akuntansi pemerintahan berkembang dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Investasi pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan

Pada umumnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.

2. Tidak ada pengungkapan laba

Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan pencapain laba. Dalam sector pemerintahan, tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dekat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapain sebuah laba.

3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan

Pemerintah tidak mempunyai kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan, dan pemerintah tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian, tidak akan terdapat pernyataan atau pengungkapan yang menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh bagian modal sebuah neraca perusahaan.

4. Penggunaan akuntansi dana

Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai sebuah entitas organisasi yang memiliki kepemilikan. Hal ini memberikan implikasi pada penggunaan persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana.

### **2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Didalam sebuah instansi pemerintahan agar tercapai sebuah keberhasilan tentu harus memiliki tujuan, berikut tujuan pokok akuntansi pemerintahan:

a. **Pertanggungjawaban**

Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab, terkait kegiatan unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintahan selama periode bersangkutan.

b. **Manajerial**

Akuntansi pemerintahan wajib menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Hal ini perlu ditingkatkan agar organisasi pemerintahan bisa mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk membuat keputusan atau perencanaan yang akan datang.

c. **Pengawasan**

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Agar terhindarnya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kinerja pemerintah.

## **2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintahan**

### **2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintahan**

Laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini untuk menghasilkan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan yang cukup besar terhadap akuntabilitas publik ini dimanfaatkan agar memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. (V. W. Sujarweni, 2015)

Laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan pihak satu dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang berstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas laporan agar pihak satu dan yang lainnya mengetahui posisi keuangan serta laporan yang harus diberikan pada saat pelaporan. (Hery, 2010)

Laporan keuangan adalah laporan yang wajib dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan, serta pemerintah pusat/daerah. Selain itu, diatur pula ketentuan kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja perangkat daerah sampai tersusunnya laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan dari tahap penerimaan dana, penyaluran dana, sampai proses akhir pelaporan. (Darise, 2010)

Laporan keuangan adalah laporan yang disusun untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Informasi

keuangan penjelasan yang diperlukan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Digunakan sebagai bagian pertanggungjawaban, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. (Arif, Muchlis, & Iskandar, 2010)

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal (*internal accountability*), yaitu kepada pihak-pihak di dalam organisasi, misalnya atasan, pegawai, dan pemeriksa maupun pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*) kepada pihak-pihak luar yang berkepentingan, misalnya masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. (Mahmudi, 2011)

Jadi, dapat disimpulkan Laporan Keuangan adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban yang disusun menjadi sebuah laporan untuk melaporkan transaksi-transaksi keuangan, dari proses penerimaan dana, penyaluran dana, seberapa besar yang telah di pakai, dan pengelolaan keuangan yang bersifat akuntabilitas dan transparan serta wajib dilaporkan untuk mengetahui informasi keuangan yang ada didalam sebuah perusahaan ataupun dilingkungan pemerintahan. Laporan yang bertujuan agar pihak-pihak yang ada didalam organisasi atau bagian pemerintahan mengetahui proses pelaporan keuangan juga untuk menggambarkan kinerja pemerintahan tersebut. Pada Laporan keuangan pemerintah terbagi mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan.

### **2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Berikut adalah tujuan dan fungsi laporan keuangan Menurut (V.W. Sujarweni, 2015)

1. Kepatuhan dan pengelolaan

Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi

Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang

5. Hubungan masyarakat

Laporan keuangan dapat memberi kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai

yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Untuk memeberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan organisasi pemerintahan.
7. Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
8. Untuk memberikan informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

### **2.1.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Menurut (Halim & Kusufi, 2012) jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap meliputi:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan reaslisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah atau daerah dalam satu periode pelaporan.LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD, LRA sekurang-kurangnya yaitu:

- a. Pendapatan LRA
- b. Belanja;
- c. Transfer;



- d. Surplus/deficit-LRA;
  - e. Pembiayaan;
  - f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pemerintah menurut PP Nomor 24 Tahun 2005. Itu artinya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih baru ada dan wajib disajikan oleh entitas pemerintah pusat dan entitas pelaporan lainnya yang menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasian.
3. Neraca
- Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca meliputi:
- a. Asset
  - b. Kewajiban
  - c. Ekuitas
4. Laporan arus kas disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan

serta kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas pada tanggal pelaporan.

5. Laporan Operasional Catatan atas laporan keuangan, merupakan sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan.

### **2.1.3 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)**

#### **2.1.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)**

APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari-31 Desember) yang ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan. Pada saat pertanggungjawab APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus di konsolidasikan ke dalam rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN). (V.W. Sujarweni, 2015)

APBN adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu Negara selama periode tertentu, pengeluaran terlebih dahulu, baru penerimaan, jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. (Halim & Kusufi, 2012)

APBN merupakan suatu dokumen yang sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara. APBN terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan merupakan estimasi pendapatan yang mungkin dicapai dalam periode yang bersangkutan. (Kamaroesid, 2013)

Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara. (Nordawan & Hertianti, 2010)

APBN merupakan ruang lingkup keuangan Negara yang dikelola langsung. APBN juga inti keuangan (akuntansi) pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan Negara karena selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. (Hariadi, E.Restianto, & Bawond, 2010)

Jadi, dapat disimpulkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah Anggaran, biaya, pendapatan, ataupun pengeluaran yang bersumber dari Negara selama satu periode tertentu, yang dibuat oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR/DPRD.

#### **2.1.3.2 Pelaksanaan APBN**

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, ditengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami

revisi/perubahan. Untuk mengalami revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. (V.W. Sujarweni, 2015)

### **2.1.3.3 Pertanggungjawaban APBN**

Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/APBD, baik dalam bentuk laporan keuangan (*financial accountability*) maupun laporan kinerja (*performance accountability*). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan Laporan Kinerja disusun sesuai dengan aturan Pemerintah yang mengatur tentang Laporan Kinerja instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. Laporan keuangan yang telah di audit ini selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. (V. W. Sujarweni, 2015)

### **2.1.4 Pengelolaan Dana**

#### **2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan Dana**

Pengelolaan Dana adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggung jawaban dan

pengawasan keuangan. Dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. (V. W. Sujarweni, 2015)

Pengelolaan Dana merupakan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk menetapkan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Negara, pedoman penyusunan rencana kerja, serta penetapan gaji dan tunjangan. (Arif et al., 2010)

Pengelolaan dana merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bersih dari KKN yang besar. Pengelolaan dana harus didasarkan pada prinsip tahunan, akuntabilitas, dan transparansi. (Mahmudi, 2011).

Pengelolaan dana adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan untuk menghasilkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. (Mulyana, 2014)

Pengelolaan dana adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. (Nordiawan, Putra, & Rahmawati, 2010)

Jadi, dapat disimpulkan Pengelolaan dana adalah suatu perencanaan, pengarahan, pemantauan, serta pengendalian dari sebuah pemerintahan yang efisien dan efektif agar mencapai tujuan. Sebuah sistem mengelola suatu Anggaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Pengelolaan dana pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan atas dana yang telah diterima dan penyaluran dana tersebut serta menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban diakhir periode/tahun.

## **2.1.5 Laporan Pertanggungjawaban**

### **2.1.5.1 Pengertian Laporan Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran, baik secara kumulatif maupun per kegiatan ditujukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD yang memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran, dan saldo kas yang ada di bendahara dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap yang diserahkan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut atau sampai dengan akhir tahun kerja. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara pengeluaran Pembantu. (Tanjung, 2011)

Laporan Pertanggung jawaban mencakup antara penyiapan Laporan Semester pertama dan Laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh BAWASDA

dan BPKP (untuk pembelanjaan yang menggunakan APBN), serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). (Sujarweni, 2015)

Laporan pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan Negara harus memberikan pertanggung jawaban atau perhitungan. (Darise, 2010)

Laporan pertanggungjawaban merupakan pengelolaan keuangan yang disampaikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan Negara yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. (Arif et al., 2010)

Laporan pertanggungjawaban adalah suatu laporan yang dimana bendahara pengelola dana dekonsentrasi dana tugas pembantuan wajib melakukan penatausahaan dan penyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang atau surat berharga dalam rangka pelaksanaan kegiatan. (Kamaroesid, 2013)

Jadi, dapat disimpulkan Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran, baik secara kumulatif maupun per kegiatan ditujukan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD yang memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran, dan saldo kas yang ada di bendahara dengan bukti penerimaan yang

sah dan lengkap yang diserahkan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan tersebut atau sampai dengan akhir tahun kerja. SPJ ini merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara pengeluaran Pembantu.

## **2.1.6 Efektivitas**

### **2.1.6.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah suatu tindakan untuk mencapai target yang sesuai dengan program atau kegiatan yang sudah dianggarkan , dan dilaksanakan oleh orang yang mendapatkan program tersebut. (Sujarweni, 2015)

Efektivitas adalah pencapaian hasil dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. (Siregar, 2015)

Efektivitas adalah menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan secara tepat, pengukuran keberhasilan. (Bastian, 2010)

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. (Mahmudi, 2016)

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggung jawaban dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian



kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. (Halim & Iqbal, 2012)

Jadi dapat disimpulkan Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

#### **2.1.7 Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)**

Menurut Kemdiknas (2010) BOP adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya BOP digunakan dalam pembiayaan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya. BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP), tingkat menengah (SMA/SMK) maupun Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat.

Menurut Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2015, adalah suatu program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Bantuan Operasional Pendidikan adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada sekolah yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing sekolah.

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara terarur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Jadi, dapat disimpulkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah program pemerintah berupa dana langsung kepada pihak-pihak sekolah yang digunakan untuk pembiayaan Sekolah dan Siswa. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ini diberikan kepada siswa yang kurang mampu agar dapat melakukan penuntasan wajib belajar.

#### **2.1.7.1 Tujuan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)**

1. Membantu sekolah untuk mengatasi biaya operasional pendidikan;

2. Meringankan beban orang tua terhadap pembiayaan pendidikan;
3. Memberi motivasi bagi penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap peserta didik yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

#### **2.1.7.2 Pemberi Bantuan Pemerintah**

Pemberi Bantuan Operasional Pendidikan adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### **2.1.7.3 Persyaratan Calon Penerima Bantuan**

1. Memiliki Nomor Pokok Sekolah (NPSN);
2. Tercatat di system Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Memiliki izin operasional yang masih berlaku;
4. Ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan dengan surat keputusan Direktur Pembinaan PK-LK, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

#### **2.1.7.4 Bentuk Bantuan Pemerintah**

Bentuk Bantuan Operasional Pendidikan adalah dalam bentuk uang.

### 2.1.7.5 Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Nilai Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang akan disalurkan kepada seluruh sasaran penerima bantuan melalui Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana APBN pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk murni.

Masing-masing sekolah akan menerima dana bantuan biaya tetap (*fixed cost*) sebagai berikut :

1. Kategori sekolah negeri

Jumlah BOP : biaya tetap + (jumlah siswa x biaya variabel)

Jumlah BOP : Rp. 10.000.000 + (jumlah siswa x Rp. 200.000)

Kategori sekolah swasta

Jumlah BOP : biaya tetap + (jumlah siswa x biaya variabel)

Jumlah BOP : Rp. 5.000.000 + (jumlah siswa x Rp. 200.000)

### 2.1.7.6 Organisasi Pelaksana, Tugas dan Tanggungjawab

#### 2.1.7.6.1 Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Pendidikan melibatkan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
2. Dinas pendidikan Provinsi;
3. Sekolah;
4. Komite Sekolah.

### **2.1.7.6.2 Tugas dan Tanggungjawab**

1. Direktorat Pembinaan PKLK
  - a. Menyusun petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan;
  - b. Menyebarluaskan informasi tentang pemberian Bantuan Operasional Pendidikan;
  - c. Menerima usulan daftar nama sekolah dan daftar nama peserta didik calon penerima bantuan;
  - d. Melakukan validasi data usulan calon penerima bantuan yang diusulkan Dinas Pendidikan Provinsi;
  - e. Menerbitkan surat keputusan penetapan penerima Bantuan Operasional Pendidikan;
  - f. Melakukan bimbingan teknis dan penandatanganan surat perjanjian pemberian Bantuan Operasional Pendidikan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan kepala sekolah yang peserta didiknya memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan;
  - g. Memproses penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan kepada sekolah yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
  - h. Menyampaikan rekapitulasi sekolah penerima Bantuan Operasional Pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
  - i. Menerima laporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Operasional Pendidikan.

## 2. Dinas Pendidikan Provinsi

- a. Mensosialisasikan informasi tentang Bantuan Operasional Pendidikan dari Direktorat Pembinaan PKLK ke sekolah;
- b. Mengetahui/menyetujui surat perjanjian pemberian bantuan;
- c. Melakukan pembinaan penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan ke sekolah;
- d. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan;
- e. Memfasilitasi penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan dari sekolah penerima bantuan pemerintah.

## 3. Sekolah Pelaksana

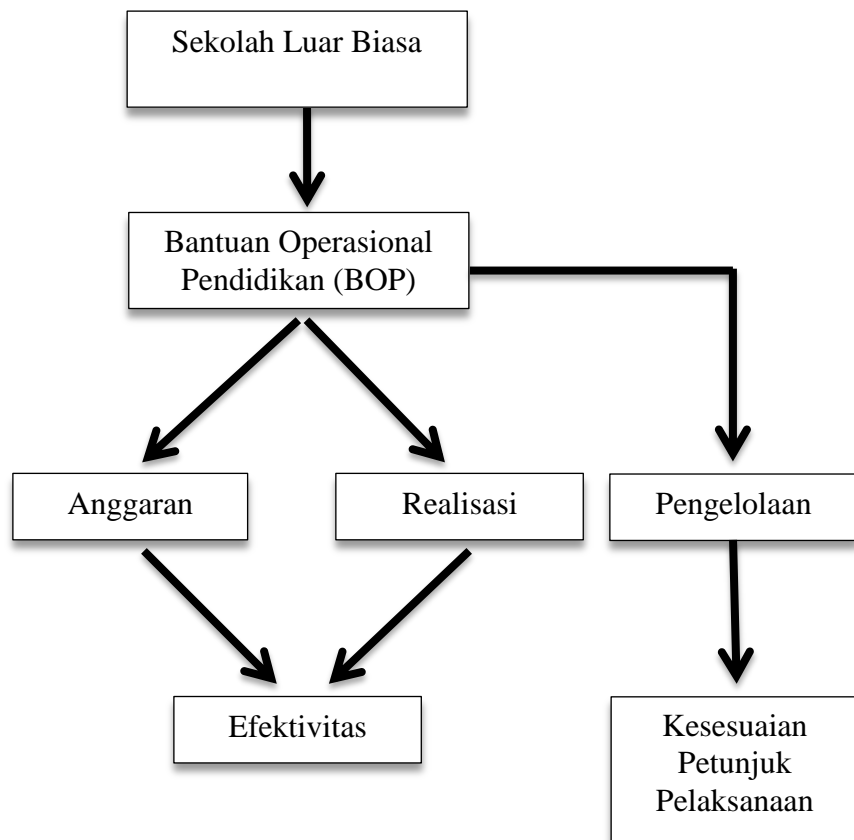
- a. Menandatangani surat perjanjian pemberian dana bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak terhadap bantuan operasional pendidikan;
- c. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Pihak penerima dapat menjadikan kemitraan yang baik dengan pihak-pihak yang berkompeten dan memberikan hasil yang optimal dan terarah;
- e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan;

- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan PK-LK;
  - g. Membuat laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
  - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan kepada Direktorat Pembinaan PKLK yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Komite Sekolah
- Membantu melakukan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Pendidikan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Penulis,2019*

## 2.3 Penelitian Terdahulu

1. (Andreyan et al., 2014)” Judul Penelitian Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada” Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada seluruh sekolah dasar, (2)



Tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS, (3) masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar, (4) Upaya mengatasi masalah dana BOS. Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sukasada. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, kuesioner dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar sudah sesuai dengan Permendiknas No. 76 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS Tahun 2013, (2) tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar mencapai 87%, berada dalam kriteria sangat efektif, (3) masalah yang dihadapi seluruh sekolah dasar yaitu dana BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami pengelolaan dana BOS, (4) upaya yang dilakukan seluruh sekolah dasar yaitu melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara kredit, dan melakukan penguatan pada komite terkait dana BOS.

2. (Hariswati, n.d.) "Judul Penelitian Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bos" Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang sumbernya berasal dari bantuan pemerintah serta menemukan hambatan dan kendala teknik. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan tehnik indepth interview dengan informan pelaksana teknik keuangan, pengambil keputusan, dan stakeholder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pertama, menimbulkan kendala dan hambatan seperti, tidak diatur hak dan kewajiban sekolah swasta dalam hal perpajakan. Kedua, skala prioritas tingkat kepentingan akuntabilitas antara bendahara dan kepala madrasah mempunyai nilai yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Ketiga, implementasi transparansi yang sifatnya modern seperti publikasi via website, call center, facebook. Keempat, kebijakan pemerintah belum mengatur standar pagu terhadap alokasi penggunaan dana bantuan yang berkaitan langsung dengan kepentingan siswa dan sifatnya operasional yang dapat mendukung secara tidak langsung terhadap kepentingan siswa.

3. (Widyatmoko & Suyatmini, ) “Judul Penelitian Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sd N Kemas I Surakarta” Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (2) pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (3) pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Kemas I Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil dari penelitian menyimpulkan (1) dalam proses perencanaan komponen yang terlibat antara lain Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara sekolah, dewan guru, dan Komite sekolah. Proses perencanaan diawali

dengan menyusun RAKS (2) Pelaksanaan pengelolaan BOS diawali dengan pengambilan dana yang dilakukan bendahara sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum di bank.

Pertanggungjawaban BOS melalui laporan yang dikerjakan bertahap setiap hari. Dalam pengelolaan BOS ada beberapa buku tata kelola yang harus dibuat yaitu Buku kas umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.

4. (Rap, 2017) "*Judul Penelitian Performing Accountability: Unanticipated Responses to Administrative Reform*" Hasil penelitian ini Di jantung reformasi Manajemen Publik Baru (NPM) terletak sebuah teori akuntabilitas untuk hasil. Dalam tiga dekade terakhir, ide normatif ini ditransfer dari "jantung Anglo-Amerika" dari reformasi semacam itu ke banyak bagian lain dunia. Melalui etnografi organisasi dari asosiasi pengguna air Meksiko, artikel tersebut menunjukkan bahwa, meskipun ada reformasi, organisasi seperti itu dapat beroperasi sebagai badan yang sebagian besar tidak responsif dan tidak transparan bagi para pengguna dan otoritas pengatur. Manajemen sebaliknya membalikkan akuntabilitas dan mengalihkan kesalahan ke bawah. Karena budaya membentuk reformasi dari dalam, reformasi tidak serta merta mengubah dan mendepolitisasi praktik manajerial sebagaimana dimaksud, tetapi memang memiliki implikasi konkret untuk praktik dan efek pengaturan akuntabilitas. Artikel tersebut berpendapat bahwa manajemen melakukan pertanggungjawaban secara budaya, dan ini berfungsi untuk perilaku manajerial yang sah secara

moral yang tidak bertanggung jawab atas hasil dan menghasilkan kinerja keuangan dan organisasi yang kurang optimal. Studi kasus berkontribusi pada perspektif interpretatif yang berlaku untuk berbagai reformasi administrasi yang mempromosikan akuntabilitas dalam pengaturan budaya dan politik yang berbeda. Studi ini mengarah pada rekomendasi spesifik untuk menangani hasil kontraproduktif dari reformasi NPM dalam pengelolaan irigasi Meksiko.

5. (Titin Rahmiatin Rahim) yang melakukan penelitian dengan judul “The Transparency of School Operational Assistance (SOA) Fund Management at MTs Ummusabri of Kendari” dikumpulkan berdasarkan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di MTs PESRI, dapat disimpulkan bahwa: 1) Semua peran dan tanggung jawab tim manajemen dana SOA sebagian besar diserahkan ke tangan bendahara karena tidak adanya tim manajemen dana SOA secara resmi. Meskipun keterlibatan pemangku kepentingan dalam tim manajemen dana SOA cukup kecil tetapi semua tugas dan tanggung jawab pengelolaan dana SOA berjalan lancar dan efektif. 2). Perencanaan dana SOA di MTs PESRI diatur dalam bentuk rinci rencana anggaran dan pengeluaran Madrasah (BSPM) berdasarkan skala prioritas. Penggunaan dana SOA di MTs PESRI mengacu pada BRPM yang ditetapkan oleh tim manajemen dana SOA, yang terdiri dari bendahara, kepala sekolah, dan disetujui oleh dewan dewan Madrasah. Implementasi dana SOA di MTs PESRI didasarkan pada pedoman menteri pendidikan dan budaya Indonesia nomor 76 tentang manual teknis

penggunaan dana. Laporan pengeluaran dana SOA disiapkan dan ditandatangani oleh bendaharawan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban dana SOA kuartal I, II, dan III. Laporan-laporan ini diakui oleh kepala sekolah yang diakui oleh kepala sekolah dan komite sekolah. 3). Pengendalian penggunaan dana SOA melibatkan kepala sekolah MTs PESRI (pemantauan internal) dan dari departemen lain seperti SAA, Departemen Pendidikan dan Departemen Agama (pemantauan eksternal). Pemantauan hanya dilakukan pada tahap implementasi dana SOA dan hanya sekadar mengendalikan dokumen atau pernyataan, sehingga kontrol cenderung menjadi kontrol parsial (kurangnya kontrol berkelanjutan).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menganalisis Efektivitas dalam Pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bintan.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

1. Teknik statistik deskriptif, digunakan untuk mengolah dan membaca data yang diperoleh. Deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut diambil.
2. Teknik pengklasifikasian data kualitatif, dengan cara memilah-milah informasi dari hasil wawancara berdasarkan komponen-komponen penelitian yang didiskusikan sehingga informasi tersebut mampu mendukung hasil studi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, termasuk dalam rangka pengambilan kesimpulan dan pemberian rekomendasi.

### 3.2 Jenis Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data penelitian ini akan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumber.  
Data primer yang diambil dengan menggunakan cara Wawancara, dan Observasi.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa laporan administrasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2018-2019.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dan data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut, misalnya data kinerja perbankan nasional yang dikeluarkan oleh suatu badan riset (Ma'ruf Abdullah, 2015). Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) (Sunyoto, 2011). Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder dari sumber tertentu dapat digunakan kembali oleh peneliti berikutnya (Kris H. Timotus, 2017)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara. Dan data sekunder berupa:

- a. Laporan Buku Kas
- b. Rencana Anggaran Belanja Bantuan Operasional Pendidikan ( RAB BOP )

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode, yaitu :

#### **1. Studi Kepustakaan**

Digunakan untuk meneliti dan mengkaji berbagai bahan dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul, topik, dan pendekatan penelitian tentang desentralisasi fiskal dan alokasi anggaran pendidikan, termasuk juga untuk mendapatkan pijakan berupa dasar peraturan dan kebijakan yang relevan, serta arah teoritisnya dari penelitian-penelitian terdahulu.

#### **2. Survey atau Observasi**

Untuk menggali data dan informasi langsung dari pihak-pihak yang berkompeten di daerah obyek penelitian, terkait dengan kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap komitmen untuk meningkatkan layanan pendidikan. Penggalan data dan informasi telah dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan selesai.

#### **3. Wawancara**

Agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi dari



informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang sedang diamati. Adapun pihak-pihak yang akan menjadi target wawancara meliputi:

- a. Kepala Sekolah SLB Negeri Bintan
- b. Bendahara SLB Negeri Bintan

#### 4. Dokumentasi

Untuk menelusuri data-data dokumen pendidikan dan penganggarnya terutama yang terkait dengan pokok penelitian, yang diperoleh dari berbagai instansi antara lain adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya, Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang objek yang diteliti.

### **3.4 Teknik Pengelolaan Data**

Efektivitas adalah alat ukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi maupun instansi untuk mencapai tujuannya. Suatu organisasi dan instansi bisa dikatakan efektif apabila pencapaian atas hasil yang diinginkan telah tercapai. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektivitas mengukur antara realisasi dan target, Apabila target tercapai baru bisa dikatakan efektif, sebaliknya jika target tidak tercapai berarti tidak efektif.

Rumus Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

### 3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menggali informasi-informasi dari responden yang sangat membantu untuk menganalisis apakah pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sesuai dengan pedoman pelaksanaan BOP.

Setelah data-data telah terkumpul peneliti bisa mulai mengorganisasi dan mengklasifikasi data. Data diklasifikasikan sesuai dengan topik yang dapat dianalisis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan BOP, dan untuk mengetahui pengelolaan dana BOP. Agar bisa melihat efektif atau tidaknya penyaluran dana penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dilakukan pendekatan sederhana, yaitu : apakah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.1**

**Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)**

<b>Persentase kinerja keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
> 100 %	<i>Sangat Efektif</i>
90 % - 100 %	<i>Efektif</i>
80 % - 90 %	<i>Cukup Efektif</i>
60 % - 80%	<i>Kurang Efektif</i>
Di bawah dari 60%	<i>Tidak Efektif</i>

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreyan, G., Bhawa, S., Haris, I. A., Artana, M., Ekonomi, J. P., & Ekonomi, F. (2014). *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada. (76)*.  
<https://doi.org/10.1021/np800528a>
- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT Indeks.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: PT Penerbit Erlangga.
- Danang Sunyoto. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Darise, N. (2010). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariadi, P., E. Restianto, Y., & Bawond, I. R. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariswati, N. (n.d.). *Tentang Implementasi Kebijakan*. 75–88.
- Hery. (2010). *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta: PT Bumi Akasara.

- Kamaroesid, H. (2013). *Sistem Administrasi Anggaran Negara (Sistem Administrasi APBN mulai T.A 2013)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kris H. Timotus. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ma'ruf Abdullah. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Mulyana, B. (2014). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Tanggerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nordiawan, D., Putra, iswahyudi S., & Rahmawati, M. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rap, E. (2017). Performing accountability: Unanticipated responses to administrative reform. *Human Organization*, 76(4), 358–369.  
<https://doi.org/10.17730/0018-7259.76.4.358>
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.

Tanjung, A. H. (2011). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Widyatmoko, S., & Suyatmini. (1907). *DI SD N KEMASAN I SURAKARTA*. (1), 153–160.

## CURICULUM VITAE



Nama : Rahmah Hardanti Putri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 04 November 1997

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : [rahmahhardantiputri@gmail.com](mailto:rahmahhardantiputri@gmail.com)

Alamat : Jl. Tugu Pahlawan Gg. Kangkung No. 16  
RT.005/RW.003 Kel.Bukit Cermin  
Kec.Tanjungpinang Barat

Pekerjaan : Honorer

Pendidikan : SD Negeri 002 Tanjungpinang Kota  
SMP Swasta Hangtuh Tanjungpinang  
SMA Negeri 2 Tanjungpinang  
STIE Pembangunan Tanjungpinang